

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Hakim Garuda Nusantara. 1998. *Politik Hukum Indonesia*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Abdul Latif dan Hasbi Ali. 2016. *Politik Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Achmad Irwan Hamzani. 2019. *Pembangunan Hukum Nasional Implementasi Cita Hukum Pancasila*. Thafa Media, Yogyakarta.
- Ahmad Mujaffar. 2020. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan*. Forum Pemuda Aswaja, Lombok Tengah.
- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amir. 1986. *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Cetakan 1. CV. Rajawali, Jakarta.
- Bruggink. 1996. *Refleksi Tentang Hukum*. Diterjemahkan B. Arief Sidharta. Cetakan ke IV. 2015. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. LP3ES, Jakarta.
- Dwidjowijoto dan Wrihatnolo. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Elexmedia Komputindo Gramedia, Jakarta.
- Edi Suharto, 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a. 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. PT. Alumni, Bandung.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum, Penelitian Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Jazim Hamidi. 2005. *Hermeneutika Hukum*. UII Press, Yogyakarta.
- Jeremy Bentham. 1979. *The Theory of Legislation* (N.M. Tripathi Private Limited, Bombay). Diterjemahkan oleh Nurhadi. 2006. *Teori Perundang-undangan (Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana)*. Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung.
- Jim Ife dan Frank Tesoriero. 2016. *Alternatif Penembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*. Edisi ke-3. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jimly Assidique. 2014. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cetakan ke tiga. Sinar Grafika, Jakarta.

- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo dan Fifit Fitri Lutfianingsih. 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer Edisi Pertama*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi. 2016. *HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK Perihal Negara, Masyarakat Sipil, dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Kesejahteraan*. Edisi Revisi, Cetakan II. Setara Press, Malang.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*. PT. Kanisius, Yogyakarta.
- Miftah Thoha. 2016. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Cetakan ke-11. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Edisi Revisi, Cetakan Ke-2. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Mu'iz Raharjo. 2021. *Pemberdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan*. Gava Media, Yogyakarta.
- Musa Asy'arie. 1997. *Islam, Etos Kerja, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Lesfi, Yogyakarta.
- Otong Rosadi dan Andi Desmon. 2020. *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*. Cetakan III. Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.
- Padmo Wahyono. 1991. *Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*. Forum Keadilan, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-9. Penerbit Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Penerbit Kencana, Jakarta.
- Philippe Nonet & Philip Selznick. 1978. *Hukum Responsif. Diterjemahkan dari Law and Society in Transition Law, Harper and Row*. 2008. Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Said Zainal Abidin. 2012. *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika, Jakarta.
- Saifuddin Yunus dan Suadi Fadli. 2017. *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Bandar Publishing, Banda Aceh.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Solly Lubis. 1995. *Bunga Rampai Pembangunan Hukum di Indonesia*. Resco, Bandung.
- Sri Soemantri. 2011. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.

- Sulistya Ekawati. 2020. *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan : untuk Memastikan Tercapainya Tujuan Perhutanan Sosial*. PT. Kanisius, Yogyakarta.
- Sunaryati Hartono. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni, Bandung.
- Sunaryati Hartono. 2009. *Politik Hukum Menuju Pembangunan Ekonomi*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta.
- Syafii Manan. 1998. *Hutan Rimbawan dan Masyarakat*. IPB Press, Bogor.
- Yuliandri. 2010. *Asas-asas Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik, Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Artikel

- Dadang Jainal Mutaqin, Isniatul Wahyuni dan Nur Hygiawati Rahayu. “Analisis Kegiatan Perhutanan Sosial dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19”. Artikel Bappenas, Volume V, Nomor 2, 31 Juli 2022.

Jurnal

- Andi Setyo Pambudi. “Capaian, Tantangan Implementasi, dan Rekomendasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Indonesia”. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, Volume 6, Februari 2023.
- Moh. Andika Lawasi. “Mengkonstruksi Akses, Pendampingan, dan Inovasi Sebagai Formula Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat, dalam Program Perhutanan Sosial”. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara JIANA*, Volume 20, Nomor 3 Desember 2022.
- Oding Affandi, Hariadi Kartodihardjo, Bramasto Nugroho, Sulistya Ekawati. “Analisis Kelembagaan Implementasi Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Utara”. *Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara*, Volume 16, Nomor 2, Oktober 2019.
- Mustangin, Desy Kusniawati, Nufa Pramina Islami, Baruna Setyaningrum, Eni Prasetyawati, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Universitas Padjadjaran*, Volume 2 Nomor 1, Desember 2017

- R. Rofiani, Nurwadjah Ahmad Eq dan Andewi Suhartini “Konsep Budaya Dalam Pandangan Islam Sebagai Sistem Nilai Budaya Global (Analisis Terhadap Pemikiran Ali Ahmad Madkur)”, *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, Volume 5 Nomor 01, Januari-Juni 2021

Internet

- Arianto A. Patunru dan Anthea Haryoko. “Kepemilikan dan Pengelolaan Hutan di Indonesia”. <https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/293-kepemilikan-dan-pengelolaan-hutan-di-ind-bd14b9e1.pdf>. diakses pada tanggal 9 April 2024.
- Hariadi Kartodihardjo. “Penentu Keberlanjutan Perhutanan Sosial, Perhutanan sosial terbukti memberikan manfaat bagi petani dan lingkungan. Perlu dicari penentu keberlanjutannya”. <https://www.forestdigest.com/detail/2048/perhutanan-sosial>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2023.
- Hariadi Kartodihardjo, “12 Modal Mengelola Hutan Lestari”, <https://www.forestdigest.com/detail/284/12-modal-mengelola-hutan-secara-lestari>, diakses pada tanggal 2 Juli 2024.
- Kementerian LHK. “Dari Perhutanan Sosial, Untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera”, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7566/dari-perhutanan-sosial-untuk-hutan-lestari-dan-masyarakat-sejahtera>. Diakses pada tanggal 3 April 2024.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Perhutanan Sosial, Kini Masyarakat Legal Mengelola Hutan”, https://www.kominfo.go.id/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legal-mengelola-hutan/0/artikel_gpr. diakses pada tanggal 11 April 2024.
- Moh. Andika Lawasi. “Perhutanan Sosial dan Akses yang Dijual”. <https://pmb.brin.go.id/perhutanan-sosial-dan-akses-yang-dijual/>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2023.
- PRCF Indonesia. “Perkembangan Kebijakan Perhutanan Sosial di Indonesia”. <https://prcfindonesia.org/perkembangan-kebijakan-perhutanan-sosial-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kehutanan*. UU Nomor 41 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan*. UU Nomor 18 Tahun 2013, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan*. UU Nomor 30 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU Nomor 15 Tahun 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU Nomor 13 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. UU Nomor 6 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Kehutanan*. PP Nomor 23 Tahun 2021, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial*. Perpres Nomor 28 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kehutanan Tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman*. Permenhut Nomor P.23/Menhut-II/2007.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan*. Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi*. Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*. Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320.

Wawancara

Budi Kus Yulianto. Kepala UPTD KPHP Tebo Timur Unit X. Wawancara tanggal 14 Mei 2024.

Eko Purwanto. Ketua Yayasan Taruna Hijau Indonesia (Pendamping HTR) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Wawancara tanggal 1 Mei 2024.

Heri Nurhadi. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada UPTD KPHP Tebo Timur Unit X. Wawancara tanggal 15 Mei 2024.

Herilanto. Ketua HTR Koperasi Produsen Mandiri Maju Bersama. Wawancara tanggal 31 April 2024.

Mawardi. Ketua HTR Koperasi Setia Jaya Mandiri. Wawancara tanggal 14 Mei 2024.

Paidin. Penyuluh Perhutanan Sosial pada UPTD KPHP Tebo Timur Unit X. Wawancara tanggal 15 Mei 2024.

Supradillah. Ketua HTR KTH Padukuhan Mandiri. Wawancara tanggal 14 Mei 2024.

Urista. Pengurus HTR Koperasi Bungo Pandan. Wawancara tanggal 14 Mei 2024.